

BAB III

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI IRAN PASKA REVOLUSI IRAN

1979

Pada tahun 1979 merupakan peristiwa bersejarah bagi Iran yang dikenal sebagai Revolusi Iran. Revolusi tersebut menghasilkan sebuah perubahan Iran yang monarki dibawah pimpinan Shah Mohammad Reza Pahlevi menjadi Republik Islam. Revolusi Iran yang terjadi tahun 1979 ini dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, seorang ulama di Iran yang merupakan pemimpin tertinggi Iran paska Revolusi Iran 1979.

Seiring bergantinya Iran menjadi Republik Islam Iran, politik luar negeri Iran juga mengalami perubahan. Sebelum Revolusi Islam tahun 1979, Iran dibawah pemerintahan Shah merupakan sekutu yang dekat dengan Barat khususnya Amerika Serikat. Bahkan dalam politik luar negeri dapat dikatakan bahwa Iran pro dengan negara-negara Barat. Akan tetapi, hal ini berubah setelah terjadinya Revolusi Iran.

Paska Revolusi Iran 1979, politik luar negeri Iran mengalami beberapa perubahan dan perbedaan. Strategi politik luar negeri Iran yang diambil oleh pemimpin Iran terhadap Barat paska revolusi dari era Khomeini hingga Rouhani terdapat dua tipe yaitu konfrontatif dan akomodatif. Pemimpin Iran yang tergolong mengambil politik luar negeri konfrontatif adalah Ayatollah Khomeini dan Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Sedangkan pemimpin Iran yang politik luar

negerinya tergolong akomodatif adalah Presiden Rafsanjani, Presiden Khatami, dan Presiden Hassan Rouhani.

A. Politik Luar Negeri Iran era Ayatollah Khomeini

Sayyid Ayatollah Ruhollah Khomeini atau dikenal juga dengan sebutan Imam Khomeini merupakan tokoh Revolusi Iran serta merupakan Pemimpin Tertinggi Iran yang pertama. Khomeini merupakan pemimpin utama dalam penggulingan Shah Pahlevi. Dirinya merupakan ulama yang memegang teguh syariat-syariat Islam. Dibawah kepemimpinannya, politik luar negeri Iran yang sebelumnya pro dengan Barat berubah seratus delapan derajat.

Politik luar negeri Iran dibawah pimpinan Khomeini terhadap Barat khususnya Amerika Serikat sangat konfrontatif. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Khomeini menyerukan sikap anti Barat dan ketidak sukannya terhadap Barat terutama Amerika Serikat yang hanya membawa kesengsaraan bagi masyarakat Iran. Hal ini terlihat jelas akan pernyataan Khomeini akan diberlakukannya cap “Setan Besar” (Sheytan-e Bozorg) terhadap Amerika Serikat.⁵⁶ Khomeini beranggapan ideologi yang Amerika Serikat terapkan kepada Iran sebelumnya merupakan ideologi yang sama sekali tidak berasakan dengan syariat Islam. Dirinya memang dikenal sebagai pemimpin Iran yang dalam menentukan kebijakan politik baik dalam negeri maupun luar negeri berlandaskan syariat Islam yang ada di dalam Al Qur’an dan As Sunnah.

⁵⁶ Fawaz A. Gergez, *Amerika dan Politik Islam : Benturan Peradaban dan Benturan Kepentingan*, Cambridge University Press, New York, 1999, hal. 122

Salah satu bentuk anti Barat lainnya dari Khomeini adalah ketika peristiwa penyanderaan 52 warga Amerika Serikat di Kedutaan Amerika Serikat yang terletak di ibukota Iran, Teheran pada 4 November 1979. Menurut laman stasiun televisi *The History Channel*, aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok mahasiswa militan Iran dengan mengambil alih kedutaan Amerika Serikat. Mereka geram karena mantan Pemimpin Iran Shah Reza Pahlevi diijinkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menjalani perawatan medis.⁵⁷

Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden Amerika kala itu Jimmy Carter melakukan jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi usaha tersebut gagal karena Khomeini menolak permohonan pembebasan sandera.⁵⁸ Bahkan permintaan yang dikeluarkan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap ditolak Khomeini. Dua pekan kemudian baru Khomeini memberikan perintah kepada mahasiswa untuk membebaskan warga non Amerika Serikat serta kaum perempuan dan kaum minoritas yang notabene orang kulit hitam. Khomeini beranggapan bahwa mereka termasuk dalam golongan *mustadh'afin* yang terpaksa melaksanakan tugas di kedutaan, oleh karenanya pantas untuk dibebaskan.⁵⁹ Peristiwa tersebut berakhir lewat jalur diplomasi Presiden AS Ronald Reagan yang menggantikan Jimmy Carter dengan bantuan mediator Aljazair. Setelah 444 hari, atas perintah Khomeini warga Amerika Serikat

⁵⁷ <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/281571-20-1-1981--iran-lepaskan-52-sandera-amerika> diakses pada 23 November 2015

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ <http://indonesian.irib.ir/component/k2/item/102964-imam-khomeini-bebasakan-perempuan-dan-kulit-hitam-as> diakses pada 23 November 2015

dibebaskan dengan kesepakatan pembebasan aset beku senilai hampir US\$ 8 miliar.⁶⁰

Di dalam kepemimpinannya, prinsip politik luar negeri Khomeini adalah dukungan terhadap kaum tertindas. Mantan Menteri Luar Negeri Iran era Mahmoud Ahmadinejad Ali Akbar Salehi mengatakan bahwa menurut Imam Khomeini prinsip terpenting dalam sebuah politik luar negeri adalah pembelaan dan dukungan konstan terhadap bangsa tertindas dan perlawanan terhadap para penindas. Dalam acara peringatan 23 tahun haul Imam Khomeini, ketika diwawancarai oleh ISNA, Salehi menegaskan bahwa kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Imam Khomeini adalah selalu mendukung kaum tertindas dan melawan kaum penindas.⁶¹ Dalam hal ini, Khomeini dalam pesannya di hari al-Quds kepada kaum Muslim untuk selalu memberikan dukungan kepada kaum-kaum tertindas seperti Palestina dan Libanon dari kaum penindas seperti Israel yang telah melakukan serangan-serangan bom tanpa belas kasihan.⁶²

Oleh karenanya, politik luar negeri Iran dalam kepemimpinan Khomeini sangat konfrontatif terhadap Barat terutama Amerika. Dirinya beranggapan bahwa banyak kaum tertindas dan menderita akibat kekuatan-kekuatan arogan dari Amerika. Terlebih lagi Amerika merupakan negara pendukung serta sekutu Israel. Khomeini mengajak untuk mengonfrontasi negara-negara adikuasa seperti

⁶⁰ http://dunia.news.viva.co.id/news/read/122627-iran_akhiri_penyanderaan_52_warga_amerika diakses pada 23 November 2015

⁶¹ http://indonesian.irib.ir/iran/politik/item/45486-Prinsip_Politik_Luar_Negeri_Imam_Khomeini_Dukungan_Terhadap_Kaum_Tertindas diakses pada 23 November 2015

⁶² *Palestina Dalam Pandangan Imam Khomeini*, penerjemah: Muhammad Anis Maulachela, penyunting: Yudi. Cet. 1, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004, hal. 223

Amerika yang selama ini melakukan penjarahan kepada kaum-kaum tertindas seperti Palestina yang juga merupakan negara Muslim.⁶³ Kepemimpinan konfrontatif Khomeini terhadap Barat hanya berlangsung selama 10 tahun (1979-1989) karena dirinya wafat akibat penyakit yang dideritanya.

B. Politik Luar Negeri Iran era Akbar Hashemi Rafsanjani

Wafatnya Imam Khomeini pada 3 Juni 1989 membuat Presiden ketiga Iran Ali Khamenei dipilih untuk menggantikan posisi sebagai Pemimpin Tertinggi Iran. Hal ini mengakibatkan perlu diadakannya pemilihan presiden baru untuk menggantikan posisi Khamenei sebagai presiden. Dalam pemilihan presiden Iran tahun 1989, Akbar Hashemi Rafsanjani yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran tahun 1988-1989 berhasil terpilih sebagai Presiden Iran yang baru.⁶⁴ Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, arah kebijakan luar negeri Rafsanjani cenderung akomodatif.

Sebelum revolusi Iran 1979, Rafsanjani merupakan tokoh lama yang berjuang mendukung Khomeini dan sering kali dijebloskan ke penjara oleh rezim Reza Pahlevi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Meskipun Rafsanjani salah satu tokoh dari kubu konservatif, akan tetapi dalam kepemimpinannya terdapat perubahan orientasi politik luar negeri Iran. Salah satu contohnya ketika Rafsanjani memilih untuk mengambil posisi moderat dalam krisis teluk yang

⁶³ Ibid hal. 223-224

⁶⁴ http://www.encyclopedia.com/topic/Hashemi_Rafsanjani.aspx diakses tanggal 24 November 2015

melibatkan Amerika dan sekutunya melawan Irak yang menduduki Kuwait.⁶⁵ Hal ini dilakukan agar Iran dapat membangun kembali hubungan yang baik dengan negara-negara Arab Saudi. Akan tetapi, usaha yang dilakukan Rafsanjani tidak membuahkan hasil karena mendapat banyak tentangan dari kubu konservatif di Iran.

Dalam politik luar negerinya, Rafsanjani yang menganut sistem liberal berusaha membangun kembali hubungan dengan negara-negara Eropa. Dengan membangun hubungan baik dengan negara-negara Eropa dapat menambah investasi asing masuk sehingga mampu memperbaiki perekonomian Iran. Terlebih lagi berakhirnya perang Iran-Irak membuat Rafsanjani berusaha keras untuk membangun kembali perekonomian Iran yang morat-marit akibat perang. Upaya yang dilakukan Rafsanjani dalam bidang ekonomi tersebut pada awal kepemimpinannya hingga 1996, membuat dirinya dikenal sebagai “Bapak Pembangunan Iran”.⁶⁶

Selain ingin membangun hubungan baik dengan negara-negara Eropa, Rafsanjani juga berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Menurutnya, mustahil untuk hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Apalagi banyak kegiatan besar yang memerlukan bantuan serta tenaga ahli dari negara lain sehingga sangat penting untuk adanya perluasan hubungan

⁶⁵ Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokrasi, dan Fenomena Khatami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 90

⁶⁶ *Ibid* hal. 41

dengan negara lain.⁶⁷ Hubungan dengan Amerika Serikat mampu meningkatkan perekonomian dalam negeri Iran.

Di era kepemimpinannya, Rafsanjani menyadari akan banyaknya perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat yang tertarik untuk berbisnis dengan Iran. Ditambah beberapa perusahaan Amerika Serikat merupakan pembeli terbesar minyak Iran yang membuat uang mengalir banyak ke perekonomian Iran.⁶⁸ Meskipun mampu memperbaiki perekonomian Iran sebelumnya, akan tetapi pandangan liberal tersebut ditentang oleh Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran. Khamenei menolak segala hal yang mampu membuka hubungan kembali dengan negara adidaya yang nantinya justru merusak dan menghilangkan prinsip-prinsip dasar revolusi.⁶⁹

Pandangan moderat Rafsanjani yang berupaya untuk membuka hubungan kembali dengan Amerika Serikat juga mendapat kritikan dari kaum konservatif. Mereka memandang bahwa pandangan Rafsanjani bersifat anti revolusi, anti agama, dan anti negara. Menghadapi kritikan-kritikan tersebut Rafsanjani langsung mengeluarkan pernyataan-pernyataan akan anti Amerika. Salah satunya adalah dukungan Rafsanjani terhadap Palestina yang korban kekejaman sekutu Amerika Serikat yaitu Israel. Hal ini dilakukannya agar dirinya tetap bertahan di kursi presidenan.⁷⁰ Sekalipun Rafsanjani dalam upayanya untuk menjalin

⁶⁷ David Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran: Religion, Society and Power*, London and Portland: Frank Cass Publishers, 2001, hal. 22

⁶⁸ Ali M. Ansari, *Supermasi Iran*. Zahra, Jakarta, 2008, hal. 166-167

⁶⁹ Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokrasi, dan Fenomena Khatami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 92

⁷⁰ Ibid hal. 93

hubungan baik dengan Barat khususnya Amerika Serikat tidak berjalan sesuai keinginan, akan tetapi perjuangan tersebut tidak berhenti pada pemerintahannya. Hal ini dikarenakan adanya usaha kembali yang dilakukan oleh penerusnya, Mohammad Khatami pada pemerintahan Iran selanjutnya.

C. Politik Luar Negeri Iran era Mohammad Khatami

Seyyed Mohammad Khatami merupakan Presiden Iran ke 5 yang menggantikan Presiden Rafsanjani yang menjabat selama dua periode. Dalam pemilihan presiden Iran tahun 1997 Khatami mendapat dukungan dari kalangan pemuda, perempuan, serta kaum intelektual yang membuat dirinya memenangkan pemilihan tersebut dengan memperoleh 70 persen suara masyarakat Iran.⁷¹ Khatami menjabat Presiden Iran selama dua periode dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005. Kemenangan Khatami sebagai presiden diharapkan mampu membawa Iran ke dalam hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Barat.

Dalam pengambilan keputusan politik luar negerinya, Khatami memiliki pemikiran yang sama dengan pendahulunya yakni Rafsanjani yang lebih memilih untuk bersikap moderat dan membuka hubungan baik dengan negara lain khususnya negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat. Sebagai penerus Rafsanjani, politik luar negeri Iran masa pemerintahan Khatami cenderung akomodatif.

Di bawah kepemimpinan Khatami, dapat dikatakan politik luar negeri Iran memasuki tahap transformasi. Salah satu contohnya ketika di awal

⁷¹ "Profile: Mohammad Khatami". *BBC News*. 6 June 2001. Diakses pada tanggal 13 September 2013

kepemimpinannya, Khatami sukses menyelenggarakan Konferensi OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Teheran tahun 1997 yang dihadiri seluruh anggota OKI. Khatami juga berhasil meyakinkan negara-negara Arab bahwa Iran telah berubah dan tidak ingin kembali ke era politik luar negeri ideologis yang cenderung mengeksport revolusi ke negara-negara tetangga di kawasan Arab.⁷² Hal ini dimaksudkan agar terciptanya perbaikan hubungan dengan negara-negara Arab khususnya Arab Saudi di tahun berikutnya.

Selain upayanya dalam memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab, Khatami juga memperlihatkan upayanya untuk mengubah citra Iran di mata negara-negara Eropa. Dalam upayanya tersebut dirinya melakukan beberapa kunjungan ke Eropa dimana Khatami merupakan presiden Iran pertama yang diundang untuk mengadakan rangkaian kunjungan kenegaraan ke negara-negara Barat. Khatami melakukan kunjungan ke Perancis, Jerman, dan Italia serta dirinya bahkan melakukan kunjungan ke Paus Yohannes Paulus II yang kemudian memberikan doa atas permintaan Khatami.⁷³

Kunjungan ke negara-negara Eropa meningkatkan popularitas Khatami di kawasan Eropa termasuk Inggris. Terlebih lagi pernyataan Khatami akan permasalahan Iran dengan Inggris perihal kasus Salman Rusdie yang dianggap telah selesai.⁷⁴ Media massa internasional di Roma mencatat bahwa kunjungan yang dilakukan Khatami ke Eropa merupakan kunjungan bersejarah Iran yang

⁷² Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokrasi, dan Fenomena Khatami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 94

⁷³ Ali M. Ansari, *Supermasi Iran*. Zahra, Jakarta, 2008, hal. 193

⁷⁴ Opcit hal. 95

selama ini menyendiri dimana Khatami mengajak negara-negara Barat untuk berdialog bersama dalam tujuan perdamaian.⁷⁵ Ajakan ini memberikan pengaruh besar dan membuat Perancis, Jerman serta Inggris merasa perlu untuk memperbaiki hubungan dengan Iran. Selain itu, kunjungan yang dilakukan Khatami memberikan dampak positif dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Eropa.⁷⁶

Tidak hanya dengan negara-negara Eropa, dalam politik luar negerinya Khatami juga menginginkan adanya perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat ketika Khatami melakukan wawancara eksklusif dengan stasiun televisi CNN pada bulan Januari 1998. Dalam wawancara tersebut, Khatami beberapa kali memuji orang-orang besar Amerika serta menyampaikan rasa hormatnya kepada bangsa Amerika.⁷⁷ Meskipun Khatami memuji akan visi yang dibangun oleh negara Amerika Serikat bahkan simpati terhadap perjuangan penghapusan perbudakan pada era Abraham Lincoln, dirinya tetap mengkritik kebijakan Amerika yang akhir-akhir ini yang kurang mencerminkan visi dasar peradaban yang Amerika yang dibangun selama lebih dari dua abad.⁷⁸

Dalam wawancara yang dilakukannya dengan CNN, Khatami menyatakan dirinya menolak akan segala bentuk terorisme. Dirinya juga menyampaikan penyesalannya akan kejadian pengambilalihan kedubes 1979. Dia menambahkan

⁷⁵ Jalil Roshandel, "Evolution of the Decision-Making Process in Iranian Foreign Policy, 1979-1999", dalam *Twent Years of Islamic Revolution: Political and Social Transition in Iran since 1979*, diedit oleh Eric Hooglund, Syracuse: Syracuse University Press, 2002, hal. 139

⁷⁶ Nikki R Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*, New Haven & London: Yale University Press, 2003, hal. 272

⁷⁷ <http://edition.cnn.com/WORLD/9801/07/iran/> diakses tanggal 27 November 2015

⁷⁸ David Menashri, *Iran: A Decade of War and Revolution*, New York: Holmes & Meier, 1990, hal. 209

pembakaran bendera Amerika bukanlah sesuatu yang dia suka dan dukung karena hal tersebut justru hanya menambah masalah.⁷⁹ Dirinya juga menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan baik dengan Barat serta ajakan kepada Amerika untuk melakukan sebuah "Dialog Peradaban" yang diharapkan mampu memperdekat hubungan Iran-Amerika Serikat.

Pada 11 September 2001, terjadi sebuah insiden penyerangan ke gedung

ketergantungan terhadap negara lain. Karena membuka dialog dengan Amerika hanya merusak keagungan revolusi dan tidak memberikan manfaat bagi Iran.⁸¹ Meski begitu, niat Khatami untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika tetap kuat. Akan tetapi, niatan tersebut justru memberikan konflik baru di dalam negeri Iran antara kubu konservatif dengan kubu reformis. Hal tersebut membuat kubu konservatif semakin agresif melancarkan tekanan-tekanan pada kubu reformis di bawah Khatami.⁸²

D. Politik Luar Negeri Iran era Mahmoud Ahmadinejad

Setelah masa pemerintahan Presiden Mohammad Khatami selesai pada tahun 2005, diadakan kembali pemilu presiden baru yang kemudian dimenangkan oleh Mahmoud Ahmadinejad yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Teheran. Dalam pemilu tersebut, Ahmadinejad berhasil mengalahkan pesaing utamanya yaitu Mantan Presiden Rafsanjani dalam dua putaran yang dilakukan tanggal 17 dan 24 Juni 2005. Ahmadinejad merupakan presiden pertama di Iran yang berasal dari luar kalangan ulama sejak 24 tahun berdirinya Republik Islam Iran. Sebagian kalangan menilai bahwa terpilihnya Ahmadinejad sebagai Presiden Iran keenam merupakan kemenangan kubu konservatif.⁸³

Berbeda dengan dua pemimpin Iran sebelumnya yakni Rafsanjani dan Khatami yang berpikiran moderat, Ahmadinejad yang notabene merupakan seorang revolusioner cenderung konfrontatif dalam menentukan kebijakan politik

⁸¹ Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokrasi, dan Fenomena Khatami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 97

⁸² Ibid

⁸³ Adel El-Gogary, *Ahmadinejad: The Nuclear Savior of Teheran Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis*, Terj. Tim Kuwais (Depok: Pustaka IIMAN, 2007), hal. 34

luar negerinya. Selain itu, Ahmadinejad mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kedamaian, kerukunan, dan usaha untuk membangun hubungan yang baik. Dirinya berkata, "Saya selalu siap menjalin kerjasama dengan negara manapun yang tidak memusuhi Iran".⁸⁴ Hal ini terlihat bahwa dirinya tetap ingin menjalin hubungan baik dengan negara lain, akan tetapi juga tegas bahkan siap untuk kontra ketika ada negara lain yang dianggap merugikan Iran.

Ahmadinejad juga menyatakan keinginannya untuk meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara Arab serta negara-negara Islam khususnya di wilayah Timur Tengah. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk negar Zionis Israel. Dirinya sangat anti untuk menjalin hubungan dengan Israel yang telah melakukan penjajahan yang tidak manusiawi kepada Palestina yang merupakan negara Islam. Bahkan terdapat pernyataan dari Ahmadinejad untuk menenyapkan Israel dari peta dunia. Pernyataan tersebut sontak menghebohkan dunia internasional. Akibat dari pernyataan kontroversial tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2005 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi hukum untuk Iran.⁸⁵ Meskipun begitu, Ahmadinejad tetap membela diri bahwa pernyataannya memang adil dan benar karena pernyataannya mewakili pendapat rakyat Iran.

Tidak hanya tentang penghapusan negara Israel, pernyataan kontroversial kembali dikeluarkan oleh Ahmadinejad terkait peristiwa Holocaust. Pada tanggal 14 April 2006, Ahmadinejad menegaskan bahwa terdapat keraguan seputar terjadinya pemusnahan bangsa Yahudi pada perang dunia kedua. Holocaust

⁸⁴ Ibid hal. 57

⁸⁵ Ibid hal. 190

merupakan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap berbagai kelompok etnis keagamaan yang korban utamanya adalah bangsa Yahudi. Holocaust yang diciptakan di Eropa tanpa campur tangan Palestina akan tetapi justru rakyat Palestina yang kemudian menjadi korban akan kekejaman bangsa Yahudi di Israel. Dirinya heran mengapa bangsa-bangsa di Timur Tengah yang harus bertanggung jawab akan pemusnahan bangsa Yahudi 60 tahun silam. Dalam sebuah muktamar wartawan di Teheran, Ahmadinejad berkata, “Negara-negara Eropabertanggung jawab membangun Israel. Kalian telah melihat permasalahannya, maka selesaikanlah.”⁸⁶

Pernyataan kontroversialnya atas peristiwa Holocaust kembali memicu ketegangan di kancah dunia internasional. Apalagi banyak pemimpin dunia yang mengagungkan peristiwa Holocaust diatas segalanya. Dapat dikatakan jika tidak ingin mendapatkan sanksi internasional, maka tidak ada yang boleh meragukan keabsahan Holocaust itu sendiri. Akan tetapi Ahmadinejad dengan berani dan tanpa ragu justru berbuat sebaliknya dan menimbulkan keraguan serta pertanyaan bagi negara lain tentang Holocaust itu sendiri. Pernyataannya perihal Israel serta Holocaust dikutuk oleh negara-negara Barat, Uni Eropa, serta secara pribadi oleh Kofi Annan selaku Sekretaris Jendral Dewan Keamanan PBB.⁸⁷

Presiden Ahmadinejad juga merupakan pemimpin Iran yang sangat anti Barat khususnya Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat Israel. Hal ini sudah terlihat sebelum dirinya menjabat menjadi presiden Iran ketika

⁸⁶ Ibid hal. 193

⁸⁷ Mirza Maulana Ar-Rusydi, *Mahmoud Ahmadinejad: Singa Persia VS Amerika Serikat*. Garai, Yogyakarta, 2007

berkampanye. Dalam kampanyenya, Ahmadinejad merupakan satu-satunya calon presiden yang berbicara dengan lantang dan blak-blakan menentang adanya hubungan Iran dan Amerika Serikat di masa depan.⁸⁸ Selain itu, Ahmadinejad menyebut dirinya sebagai *ushul-geroi* yang secara politis berarti bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Revolusi Islam 1979 yang kental akan nilai-nilai Islam. Sehingga haram baginya untuk menjalin sebuah hubungan dengan Amerika Serikat yang sering kali mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, terpilihnya Ahmadinejad menjadi presiden baru Iran merupakan hal yang patut diwaspadai oleh Amerika terutama sosok Ahmadinejad yang arogan dan selalu menentang kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat.

Menurut seorang revolusioner seperti Ahmadinejad, menjalin hubungan dengan Amerika Serikat lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Dirinya menegaskan bahwa Amerika Serikat lebih membutuhkan Iran, sehingga jika dulu Amerika bebas memutuskan hubungan dengan Iran maka kini terserah Iran apakah akan menyambung hubungan dengan Iran.⁸⁹ Ahmadinejad juga memiliki beberapa alasan mengapa Amerika lebih membutuhkan Iran serta hubungan dengan Amerika justru lebih merugikan Iran. Alasan-alasan tersebut diantaranya :

1. Iran merupakan negara Timur Tengah penghasil minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Di tengah krisis minyak seperti sekarang ini, Amerika Serikat akan menjadi satu-satunya negara penguasa sumber minyak

⁸⁸ Muhsin Labib et. all, *Ahmadinejad! David di Tengah Angkara Goliath Dunia*, Penerbit Hikmah, Jakarta, 2006, hal.134

⁸⁹ *Ibid* hal. 180

terbesar dunia dan bisa sepenuhnya mengontrol harga minyak di pasar internasional apabila dapat menjalin hubungan baik dengan Iran.

2. Ekonomi Iran merupakan yang paling potensial diantara semua negara di Timur Tengah. Iran juga memiliki potensi dalam investasi terutama di sektor pertambangan dan energi. Apalagi dengan ditemukannya tambang besar uranium di Iran.
3. Iran merupakan satu-satunya negara yang mungkin menyelamatkan AS dari lumpur hidup Irak. Pertama, karena mayoritas penduduk Irak memeluk mazhab Syiah seperti halnya mayoritas penduduk Iran. Kedua, semasa perang dengan Irak, Iran adalah negara yang paling banyak menampung para pencari suaka Irak yang melarikan diri dari kekejaman Saddam Husein. Para pencari suaka tersebut kini membentuk lingkaran elit politik di Irak, oleh karenanya Iran sedikit banyak memiliki ikatan emosional dengan mereka. Ketiga, semasa dua kali invasi yang dilakukan oleh AS dan sekutunya yang mengakibatkan penderitaan panjang oleh rakyat Irak, Iran merupakan negara yang bersikap netral meskipun secara politik tetap mengecam terhadap kedua invasi tersebut.
4. Pamor AS di mata masyarakat Timur Tengah sedang berada dalam titik paling rendah, sehingga ketika Iran menjalin hubungan dengan AS berarti Iran harus membersihkan semua kotoran yang dibuat AS selama beberapa

tahun terakhir ini di kawasan Timur Tengah. Dan hal ini jelas bukan pilihan yang akan ditanggung oleh Iran secara ikhlas.⁹⁰

Sikap Ahmadinejad yang anti Barat khususnya Amerika Serikat diaplikasikan olehnya dalam sebuah kebijakan kontroversial yang melarang seluruh televisi dan radio di Iran untuk menayangkan serta memperdengarkan musik Barat khususnya Amerika. Tidak hanya itu, dirinya memerintahkan untuk memblokir segala sesuatu yang tidak senonoh dan tidak Islami dari budaya Barat. Hal ini merupakan bentuk janjinya untuk melawan apa saja yang disebut invasi kebudayaan Barat serta lebih mengedepankan nilai-nilai Islam.⁹¹

Kebijakan kontroversial lainnya dari Mahomud Ahmdinejad adalah perihal permasalahan nuklir Iran. Ahmadinejad mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan pengembangan program nuklir Iran yang sempat terhenti. Hal tersebut langsung menimbulkan isu bahwa Iran akan mengadakan pengayaan uranium untuk membuat senjata pemusnah massal. Menanggapi isu tersebut, Ahmadinejad dengan lantang menegaskan bahwa apa yang Iran perbuat hanya untuk tujuan damai serta kemajuan teknologi Iran. Dirinya mengatakan bahwa adanya senjata pemusnah massal hanya akan menciptakan kekejaman serta kehancuran, sehingga Iran tidak membutuhkan hal tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, Ahmadinejad tetap melanjutkan pengembangan rogram nuklir Iran meski membuat Barat khususnya Amerika geram akan hal ini.

⁹⁰ Ibid hal. 181-182

⁹¹ <http://hot.detik.com/read/2005/12/20/100548/502295/10/presiden-iran-larang-musik-barat>
diakse tanggal 2 Desember 2015

Dalam sebuah muktamar di kota Masyhad, Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah berhasil meningkatkan pengayaan uranium sampai level 3,5 persen. Dirinya juga menegaskan bahwa peningkatan pengayaan uranium serta seluruh program nuklir Iran masih dibawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan tunduk pada standarisasi internasional serta perjanjian *non-proliferation*. Meskipun begitu, sejumlah negara Eropa dan AS serta Israel mengancam bahwa mereka akan tetap berusaha untuk mengambil langkah agar Iran segera menghentikan program nuklirnya.⁹² Ancaman tersebut tidak membuat Ahmadinejad mundur, apalagi level 3,5 persen yang tidak memungkinkan untuk memproduksi senjata nuklir dan sebatas sebagai tenaga listrik cadangan.

Kekhawatiran akan kebijakan yang dikeluarkan Ahmadinejad perihal nuklir Iran, membuat Amerika Serikat membawa kasus nuklir Iran ke hadapan Dewan Keamanan PBB. Akibatnya Iran pun mendapatkan beberapa sanksi internasional dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1737. Sanksi-sanksi tersebut diantaranya larangan penjualan segala bahan yang dapat digunakan dalam program nuklir Iran. DK PBB juga melarang perjalanan ke luar negeri kepada dua belas orang yang terlibat dalam pengembangan program nuklir Iran dimana salah satunya adalah panglima tertinggi Pengawal Revolusi, Mayor Jendral Yahya Rahim Safavi.⁹³

⁹² Adel El-Gogary, *Ahmadinejad: The Nuclear Savior of Teheran Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis*, Terj. Tim Kuwais (Depok: Pustaka IIMAN, 2007), hal. 274-275

⁹³ Kasra Naji, *Ahmadinejad: The Secret History of Iran's Radical Leader*, I.B. Tauris, United Kingdom, 2007, hal. 129

Kedua belas orang tersebut beserta tujuh perusahaan Iran yang terlibat dalam kegiatan produksi nuklir Iran dalam resolusi DK PBB mendapat sanksi perihal pembekuan aset-aset luar negeri yang mereka miliki. Dewan Keamanan PBB juga mengancam akan mengadakan pertemuan kembali dalam enam puluh hari dan akan menjatuhkan sanksi yang lebih banyak apabila Iran tidak mau bekerja sama.⁹⁴ Akan tetapi sanksi tersebut tidak membuat Iran menghentikan program nuklirnya, karena Ahmadinejad beranggapan bahwa program nuklir Iran adalah untuk tujuan damai dalam memperoleh pasokan energi cadangan yang nantinya mampu memberikan kesejahteraan.

Sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Iran tidak hanya sekali, tetapi DK PBB sudah memberikan sanksi kepada Iran hingga tiga kali yaitu dijatuhkan pada 3 Maret 2008 dan 9 Juni 2010 sejak sanksi pertama dijatuhkan pada Desember 2006. Dalam sanksi yang ketiga terdapat draf resolusi yang menyerukan tindakan terhadap bank-bank Iran di luar negeri jika ada kaitannya dengan nuklir serta mewaspadaikan transaksi dengan bank Iran mana pun, termasuk bank sentral. Selain itu, adanya perluasan embargo senjata serta memasukkan tiga perusahaan yang dimiliki Iran Shipping Lines dan 15 perusahaan milik Revolutionary Guard Corps ke dalam daftar hitam.⁹⁵ Menanggapi hal tersebut Ahmadinejad mengancam untuk menghentikan pembicaraan soal program nuklir.

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Dikutip dari KOMPAS-Kamis, 10 Juni 2010 "PROGRAM NUKLIR IRAN: DK PBB Jatuhkan Sanksi ke Iran" Diakses tanggal 2 Desember 2015

Selain sanksi dari Dewan Keamanan PBB, Iran juga mendapatkan sanksi dari Uni Eropa. Uni Eropa melarang Iran Air menggunakan wilayah udaranya dengan alasan keselamatan. Larangan tersebut dikeluarkan setelah Uni Eropa dan Badan Keselamatan Penerbangan Eropa melakukan kunjungan ke Iran.⁹⁶ Selain itu, Uni Eropa bersama dengan Kanada juga memberikan sanksi ke Iran mencakup sektor perdagangan, keuangan, energi, dan transportasi. Sanksi tersebut berisi larangan investasi dan alih teknologi di bidang energi khususnya sektor gas serta pembatasan perdagangan dengan negara Iran.⁹⁷

Meskipun Ahmadinejad sangat keras dalam mempertahankan program nuklir Iran tanpa memperdulikan sanksi yang diberikan oleh PBB dan Barat, hal ini tidak menutup kemungkinan dirinya serta Iran membicarakan kasus nuklir Iran ke meja perundingan. Akan tetapi, Iran siap berunding selama ada jaminan perundingan dapat berjalan dengan adil. Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki mengatakan bahwa perundingan bisa diteruskan selama berjalan dengan adil dan hak Iran untuk memanfaatkan energi nuklir dalam tujuan damai diakui.⁹⁸ Jika demikian, Iran siap melakukan perundingan program nuklirnya dengan Kelompok Vienna dan P5 + 1. Kelompok Vienna yang dimaksud adalah Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Sedangkan P5 + 1 adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China ditambah Jerman.

⁹⁶ Dikutip dari KOMPAS-Rabu, 7 Juli 2010 "Maskapai Iran Dilarang Terbang di Uni Eropa"
Diakses tanggal 2 Desember 2015

⁹⁷ Dikutip dari KOMPAS-Rabu 28 Juli 2010 "UE dan Kanada Tambah Sanksi ke Iran" Diakses tanggal 2 Desember 2015

⁹⁸ Dikutip dari KOMPAS-Jumat, 24 September 2010 "NUKLIR IRAN: Iran Siap Berunding asalkan Adil" Diakses tanggal 2 Desember 2015